

**ANALISIS WACANA KRITIS PEMBERITAAN 100 HARI GEBRAKAN
PRABOWO- GIBRAN DI DUNIA PENDIDIKAN PADA MEDIA KOMPAS.COM**

Wiji Mustainah¹, Mukhlis², Eva Ardiana Indrariansi³

^{1,2,3}Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang, Indonesia
ina654650@gmail.com¹, mukhlis@gmail.com², evaardiana@upgris.ac.id³

ABSTRACT

This study examines media ideology in the coverage of Prabowo–Gibran’s 100 Days of Breakthroughs in Education on Kompas.com using Teun A. van Dijk’s Critical Discourse Analysis (CDA) model. Data consist of five news articles published between January and February 2025, selected through purposive sampling. The analysis was conducted qualitatively across three dimensions: text (macro, micro, and superstructure), social cognition, and social context. The findings reveal that the media do not merely report education policies but actively construct public opinion through linguistic strategies, issue framing, and rhetorical devices. While policies such as the 13-year compulsory education and teacher allowance improvements are portrayed as achievements, issues of educational equity and the welfare of honorary teachers are critically addressed. These results support earlier studies (Sari, 2020; Widodo, 2021) but provide a novel contribution by highlighting how the media simultaneously legitimize and criticize government policies during the early phase of a new administration. The study concludes that media coverage functions as an ideological arena where government, society, and media interact, emphasizing the need for transparency and broader public participation in education policy formulation.

Keywords: *Critical Discourse Analysis, Media Ideology, Education Policy, Prabowo–Gibran*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengungkap ideologi media dalam pemberitaan 100 Hari Gebrakan Prabowo–Gibran di Dunia Pendidikan pada Kompas.com dengan menggunakan model Analisis Wacana Kritis (AWK) Teun A. van Dijk. Data berupa artikel berita periode Januari 2025 dianalisis secara kualitatif melalui tiga dimensi wacana: teks (struktur makro, mikro, dan superstruktur), kognisi sosial, dan konteks sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media tidak hanya menyampaikan informasi kebijakan, tetapi juga membentuk opini publik melalui strategi bahasa, penekanan isu, dan retorika tertentu. Kebijakan wajib belajar 13 tahun dan peningkatan tunjangan guru diposisikan sebagai capaian, sementara isu pemerataan pendidikan dan kesejahteraan guru honorer dikritisi. Pemberitaan menunjukkan tarik-menarik ideologis antara pemerintah, media, dan publik. Penelitian ini menegaskan pentingnya transparansi pemerintah serta partisipasi Masyarakat dalam perumusan kebijakan pendidikan.

Kata Kunci: Analisis Wacana Kritis, Ideologi Media, Kebijakan Pendidikan, Prabowo-Gibran

A. Pendahuluan

Masyarakat dapat dengan mudah menemukan informasi atau berita di era digital saat ini. Karena komunikasi saat ini sangat mudah melalui media online. Berita 100 Hari Gebrakan Prabowo- Gibran di Dunia Pendidikan yang disiarkan oleh Kompas.com dan tersebar di berbagai media pada tahun 2024 menggegerkan masyarakat Indonesia. Banyak orang di masyarakat dan media mencari informasi tentang berita ini, termasuk Kompas.com. Media massa memiliki kemampuan untuk membentuk opini publik dan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap suatu peristiwa. Media kian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, terutama karena media berita online menjadi lebih populer karena lebih mudah digunakan dan mudah digunakan. Media massa sangat berperan dalam mengontrol dan membingkai masalah tersebut. Media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengajarkan realitas sosial melalui pilihan bahasa, penekanan topik, dan strategi retorika, menurut McQuail (2010). Pemberitaan media dalam bidang pendidikan dapat memengaruhi

persepsi publik, membentuk opini, dan bahkan memberi tekanan pada pemerintah untuk melakukan janji politiknya. Oleh karena itu, analisis teks media sangat penting untuk memahami bagaimana masalah pendidikan dibangun, ditafsirkan, dan dibahas di ruang publik.

Salah satu berita yang menarik perhatian masyarakat adalah perubahan kebijakan pendidikan yang telah diterapkan dalam 100 hari pertama. Kebijakan tersebut meliputi penegasan kewajiban belajar selama 13 tahun, peningkatan tunjangan sertifikasi guru guna memperbaiki kesejahteraan mereka, pengurangan beban administrasi bagi guru, serta redistribusi guru Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK, ke sekolah swasta. Berita ini dipilih karena kebijakan ini cukup signifikan dan menggantikan jargon sebelumnya seperti "Merdeka Belajar" yang diperkenalkan pada periode sebelumnya, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan kebingungan di kalangan masyarakat. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara janji kampanye dan realisasi kebijakan, misalnya janji kenaikan gaji guru sebesar Rp 2 juta yang nyatanya hanya terealisasi dalam bentuk

tunjangan sertifikasi sebesar Rp 2 juta dan belum menyentuh guru honorer. Beban pendidikan masih sangat berat terutama bagi masyarakat karena dominasi sekolah swasta yang tidak gratis dan kurangnya sekolah negeri, sehingga kewajiban belajar selama 13 tahun bisa menambah beban ekonomi jika akses ke pendidikan negeri belum memadai. Meskipun anggaran pendidikan digunakan secara efisien, jumlahnya masih dianggap kurang untuk mengatasi masalah kualitas dan pemerataan pendidikan secara menyeluruh. Dibutuhkan keterlibatan publik yang lebih substansial dalam tahap perencanaan kebijakan agar tidak menimbulkan polemik dan informasi yang salah. Hal ini penting agar kebijakan seperti evaluasi kembali jalur zonasi PPDB dan rencana pengaktifan kembali ujian nasional dapat diterima dengan baik dan berjalan efektif.

Teks berita berjudul 100 Hari Gebrakan Prabowo–Gibran di Dunia Pendidikan dapat dianalisis dengan menggunakan teori analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Teun A. van Dijk. Eriyanto (2009) menyatakan bahwa Critical Discourse Analysis (CDA) adalah metode untuk

menganalisis secara kritis wacana, baik yang diucapkan maupun ditulis. Ras, politik, kelas sosial, gender, dan hegemoni adalah beberapa topik wacana kritis yang sering dibahas. Van Dijk menegaskan dalam kerangka teorinya bahwa analisis wacana harus mempertimbangkan tidak hanya teks tetapi juga proses pembuatan teks. Kognisi sosial adalah pendekatan yang digunakan, di mana teks dan konteks sangat penting untuk memahami diskusi secara menyeluruh. Sehingga informasi yang dikaji dapat dipahami secara menyeluruh, konteks diperlukan untuk memeriksa hubungan antara teks dan elemen di luar bahasa, seperti faktor sosial dan budaya (Sumarlam, 2020). Wacana kritis berfokus pada pemahaman mendalam terhadap konteks sosial dan politik dari karya bahasa dan tulisan, termasuk elemen ideologi, struktur wacana, pembentukan masyarakat, dan hak-hak sosial. Dengan demikian, analisis wacana kritis berupaya mengungkap struktur politik dan ekonomi yang melatarbelakangi teks, serta bagaimana kelas, gender, budaya, dan agama memengaruhi teks dan membentuk makna yang lebih luas

(Zuhri, 2020). Karena teks merupakan produk dari praktik produksi, penelitian wacana tidak boleh terbatas pada analisis teks, kata van Dijk (2015).

Memahami berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk mengkaji hubungan antara teks, pikiran, dan konteks sosial adalah penting dalam menganalisis wacana secara kritis. Model analisis

wacana kritis Van Dijk adalah salah satu pendekatan yang banyak digunakan dan menawarkan kerangka kerja yang luas untuk analisis mendalam wacana. Dikenal bahwa model ini memiliki kerangka tiga dimensi: teks, kognisi sosial, dan konteks sosial (Eriyanto, 2011). Sebaliknya, dimensi teks terkait erat dengan tingkatan atau struktur yang membangun konteks. Dimensi teks melihat bagaimana struktur teks dan strategi wacana menegaskan tema tertentu. Dimensi kognisi sosial melihat bagaimana kognisi individu wartawan terlibat dalam pembuatan teks berita. Meskipun demikian, elemen konteks sosial memeriksa bagaimana wacana sosial berkembang. Dalam hal ini, Van Dijk membaginya menjadi tiga tingkat: superstruktur, struktur mikro, dan

struktur makro (Bungin, 2007). Struktur mikro, yang mencakup makna lokal dari pilihan kata, kalimat, dan gaya bahasa yang digunakan dalam teks, dan struktur makro, yang mencakup kerangka teks yang terdiri dari pendahuluan, isi, penutup, dan kesimpulan (Eriyanto, 2011:227).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemberitaan mengenai kebijakan pendidikan kerap kali sarat dengan ideologi media. Misalnya, penelitian oleh Sari (2020) menemukan bahwa media arus utama cenderung mengonstruksi kebijakan zonasi sebagai kebijakan yang penuh masalah, sementara media alternatif lebih menyoroti aspek pemerataan akses. Penelitian lain oleh Widodo (2021) menunjukkan bahwa bahasa retorik seperti metafora dan diksi evaluatif sering dipakai untuk memperkuat kritik terhadap pemerintah. Dengan demikian, analisis wacana kritis tidak hanya penting untuk menyingkap struktur teks, tetapi juga untuk memahami relasi kuasa antara pemerintah, media, dan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana menggunakan

model Teun A. Van Dijk untuk melakukan analisis wacana kritis pada pemberitaan tentang 100 Hari Gebrakan Prabowo-Gibran dalam bidang pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana media menyampaikan dan membingkai informasi yang terkait dengan gebrakan tersebut, serta bagaimana struktur wacana dalam berita tersebut dapat memengaruhi persepsi publik. Peneliti ingin melakukan analisis ini karena ada kemungkinan ideologi atau makna tersirat yang disampaikan melalui berita media yang tidak selalu terlihat secara langsung. Penelitian ini berusaha mengkaji secara menyeluruh berbagai elemen seperti struktur teks, konteks sosial, dan strategi retorik yang digunakan dalam berita tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis model Teun A. Van Dijk. Diharapkan penelitian ini akan meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana media membentuk opini masyarakat dan bagaimana ideologi dan kekuasaan tersirat dalam teks berita.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Analisis Wacana Kritis (AWK) model Teun A. van Dijk. Data penelitian berupa 5 artikel berita dari Kompas.com tentang 100 hari kebijakan pendidikan Prabowo–Gibran, diterbitkan antara 26 Januari–10 Februari 2025. Data dipilih dengan teknik purposive sampling berdasarkan relevansi dengan isu pendidikan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode simak bebas libat cakap (Sudaryanto, 1993). Menurut Sudaryanto (1993: 133), dalam teknik simak bebas libat cakap, peneliti hanya berfungsi sebagai pengamat terhadap potensi data yang muncul dari peristiwa kebahasaan di luar diri mereka sendiri, tanpa ikut menentukan pembentukan atau kemunculan data. Akibatnya, peneliti hanya bertindak sebagai pemerhati dalam penelitian ini dan tidak berpartisipasi langsung dalam pembentukan atau kemunculan data. Analisis dilakukan dengan memeriksa tiga dimensi wacana: (1) struktur teks (makro, mikro, superstruktur), (2) kognisi sosial wartawan, dan (3) konteks sosial pemberitaan. Validitas data diperkuat dengan triangulasi

teori menggunakan literatur analisis wacana kritis dan studi kebijakan pendidikan.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dan metode analisis wacana kritis model Teun A. Van Dijk digunakan untuk menghasilkan data analisis dari berita. Analisis wacana model Van Dijk menganalisis tiga elemen atau dimensi, yaitu dimenti teks (struktur mikro dan makro). Hasil penelitian akan dijelaskan sebagai berikut:

Struktur Makro (Tematik)

Struktur makro menurut Teun A. van Dijk dalam kajian wacana (discourse analysis) merujuk pada tingkat struktur yang lebih tinggi dalam teks atau wacana, yang mengorganisasi keseluruhan isi dan makna teks secara global. ruktur makro membantu pembaca memahami garis besar wacana sebelum masuk ke rincian. Eriyanto (2011) menyatakan bahwa struktur makro tidak hanya menampilkan ide-ide utama tetapi juga menciptakan subtopik-subtopik yang mendukung cerita utama, sehingga teks tetap konsisten. Teks berita tentang 100 Hari Gebrakan Prabowo-Gibran di Dunia Pendidikan secara keseluruhan

fokus pada evaluasi awal kebijakan pendidikan selama seratus hari pertama pemerintahan, menurut dimensi struktur makro. Ini ditunjukkan dengan pernyataan "Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memang tidak menargetkan capaian 100 hari kerja, tetapi banyak hal yang dijanjikannya untuk bidang pendidikan..." yang menegaskan bahwa janji-janji pendidikan tetap menjadi perhatian penting meskipun tidak ada target resmi. Oleh karena itu, masalah utama yang muncul adalah bagaimana pemerintahan baru membuat, menerapkan, dan menghadapi masalah kebijakan pendidikan.

Berbagai subtopik dalam teks juga menunjukkan berbagai fokus. Pertama, pembentukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), yang dipimpin oleh Abdul Mu'ti, menimbulkan masalah pemisahan kelembagaan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa penataan struktural adalah langkah awal dari gebrakan pemerintahan. Kedua, sejumlah kebijakan utama yang langsung mempengaruhi sektor pendidikan termasuk penetapan wajib belajar 13 tahun, pengurangan beban administrasi, peningkatan tunjangan

sertifikasi guru, dan pemindahan guru ASN ke institusi pendidikan swasta. Subtopik ini menekankan tindakan konkret yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan akses. Namun, masalah pemerataan pendidikan juga diangkat dalam berita ini. Kutipan *“Jumlah PAUD negeri hanya ada 6.162 sekolah (3,13 persen), sisanya dikelola swasta. Begitu pula di tingkat SMA dan SMK yang masih didominasi swasta...”* memperlihatkan kesulitan yang ditimbulkan oleh dominasi sekolah swasta yang tidak selalu gratis. Hal ini terkait dengan kondisi ekonomi keluarga Indonesia, yang berpotensi membuat lebih banyak biaya pendidikan. Teks juga menyebutkan solusi untuk masalah tersebut: pemerintah tidak perlu terburu-buru membangun sekolah baru, tetapi bisa bekerja sama dengan sekolah swasta untuk pemerataan pendidikan.

Komunikasi publik pemerintah juga menjadi subjek penelitian. Meskipun teks menekankan bahwa keterbukaan informasi sangat baik untuk transparansi, cara penyampaian yang tidak lengkap justru menimbulkan kebingungan dan berpotensi menimbulkan kesalahan.

Selain itu, janji kenaikan gaji guru masih belum terpenuhi, yang menarik perhatian pada masalah kesejahteraan guru. Sementara guru honorer tetap terpinggirkan, realisasi saat ini baru mencakup tunjangan sertifikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara janji politik dan implementasi kebijakan. Selain itu, teks

juga membahas agenda evaluasi kebijakan. Ini termasuk rencana menghidupkan kembali ujian nasional dan jalur zonasi PPDB. Kedua masalah ini sangat penting karena melibatkan partisipasi publik yang luas dan jika tidak dikomunikasikan dengan benar, dapat menyebabkan perdebatan. Oleh karena itu, struktur makro teks berita ini menunjukkan pencapaian kebijakan serta pergeseran antara janji, pelaksanaan, kritik, dan tanggapan pemerintah. Struktur makro ini memetakan masalah seperti miskomunikasi, beban masyarakat, dan pendidikan yang tidak merata. Sebaliknya, solusi seperti kebijakan baru, peraturan, dan diskusi publik juga ditampilkan. Pola tersebut menggambarkan kisah yang terus berubah antara hambatan dan upaya pemerintah. Selain itu, struktur makro

mencerminkan ideologi bahwa negara harus memperjuangkan hak pendidikan secara nasional. Pemerintah digambarkan sebagai pihak yang menanggapi kritik dan keinginan publik, menunjukkan keterbukaan untuk diskusi dan perbaikan sebagai nilai demokratis dalam kebijakan pendidikan. Secara keseluruhan, struktur makro mengatur tema utama dan sub-tema secara sistematis, memberikan gambaran lengkap tentang kebijakan pendidikan yang dapat diterima dari berbagai sudut pandang, dan memungkinkan kritik konstruktif dan legitimasi dalam konteks sosial-politik Indonesia.

Secara umum, struktur makro menyatukan masalah utama dalam cerita yang konsisten. Pada 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, subtopik yang sistematis, mulai dari perubahan kelembagaan, implementasi kebijakan, masalah pemerataan, hingga evaluasi dan respons publik, memperkuat tema utama evaluasi kebijakan pendidikan. Pola ini menghasilkan cerita yang selalu berubah yang menunjukkan prestasi pemerintah dan memungkinkan kritik konstruktif. Oleh karena itu, teks berita

menggambarkan keyakinan bahwa negara harus melindungi hak pendidikan, dan media berfungsi sebagai tempat di mana pemerintah dan masyarakat dapat berbicara secara kritis.

Tabel 1 Data Struktur Makro Wacana Kritis

No	Elemen Wacana	Kutipan Berita	Analisis
1	Struktur makro (tematik)		Topik utama adalah evaluasi awal kebijakan pendidikan dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.
	a. Topik	"Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memang tidak menargetkan capaian 100 hari kerja, tetapi banyak hal yang dijanjikannya untuk bidang pendidikan..."	
	b. Subtopik: Pemisahan Kemendikdasmen	"Pemerintah memulai kerjanya dengan memisahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ... dengan menunjuk Abdul Mu'ti sebagai menterinya."	Menyoroti perubahan struktur kelembagaan dan penunjukan menteri baru sebagai awal gebrakan.
	c. Subtopik: Kebijakan Utama	"Sejumlah perubahan kebijakan pendidikan telah dilakukan dalam 100 hari pertama, mulai dari penegasan wajib belajar 13 tahun, menaikkan tunjangan sertifikasi guru... hingga redistribusi guru ASN."	Menekankan kebijakan konkret yang diambil untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.
	d. Subtopik: Tantangan Pemerataan	"Jumlah PAUD negeri hanya ada 6.162 sekolah (3,13 persen), sisanya dikelola swasta. Begitu pula di tingkat SMA dan SMK yang masih didominasi swasta..."	Menunjukkan masalah mendasar berupa dominasi sekolah swasta yang menimbulkan beban biaya pendidikan.
	e. Subtopik: Komunikasi Publik	"Di satu sisi keterbukaan informasi ini baik sebagai upaya transparansi, tetapi di sisi lain informasinya menjadi sepotong-sepotong."	Menyoroti gaya komunikasi publik Kemendikdasmen yang terbuka tetapi tidak utuh, berpotensi menimbulkan misinformasi.
	f. Subtopik: Kesejahteraan Guru	"Realisasi janji peningkatan kesejahteraan guru itu belum menyentuh para guru honorer."	Memperlihatkan adanya kesenjangan antara janji kampanye dengan implementasi nyata kebijakan guru.

Dari data pada Tabel 1 terlihat bahwa pemberitaan tidak hanya

menyoroti capaian kebijakan, tetapi juga menghadirkan kritik terhadap pemerataan pendidikan dan kesejahteraan guru. Dengan demikian, struktur makro memperlihatkan keseimbangan antara legitimasi pemerintah dan suara kritis masyarakat.

Superstruktur Skematik

Analisis Superstruktur Makro Wacana Kritis Teun A. van Dijk pada Teks berita 100 Hari Gebrakan Prabowo-Gibran di Dunia Pendidikan

Dalam analisis wacana kritis Teun A. van Dijk, superstruktur adalah kerangka penyusunan informasi dalam teks yang mengatur bagian penting seperti pembuka, isi, dan penutup. Teks dimulai dengan pernyataan bahwa meskipun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak menargetkan capaian 100 hari kerja, janji pendidikan harus dipenuhi. Eriyanto (2011) menyatakan bahwa superstruktur merupakan representasi dari cara teks disusun untuk menekankan elemen utama cerita, seperti ringkasan, isi utama, dan kesimpulan.

Dalam teks berita *100 Hari Gebrakan Prabowo–Gibran di Dunia*

Pendidikan, superstruktur terlihat dari susunan yang sistematis. Bagian pembuka berita memberikan konteks awal bahwa pemerintah memang tidak menargetkan capaian 100 hari, tetapi publik tetap menagih janji pendidikan. Hal ini tampak dalam kutipan: *“Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memang tidak menargetkan capaian 100 hari kerja, tetapi banyak hal yang dijanjkannya...”*. Kutipan ini berfungsi sebagai pintu masuk pembaca untuk memahami kerangka evaluasi kebijakan.

Bagian isi berita kemudian menguraikan berbagai kebijakan dan langkah konkret yang dilakukan. Misalnya, pada aspek struktural: *“Pemerintah memulai kerjanya dengan memisahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah... menunjuk Abdul Mu’ti sebagai menteri...”* Kutipan ini memperlihatkan gebrakan awal berupa pemisahan kelembagaan. Selanjutnya, isi berita menekankan program utama: *“Sejumlah perubahan kebijakan pendidikan telah dilakukan... mulai dari wajib belajar 13 tahun, tunjangan guru, hingga redistribusi guru ASN.”* Narasi ini menunjukkan capaian awal

pemerintahan dalam seratus hari. Di sisi lain, isi juga menyoroti tantangan dan kritik. Misalnya,

“Jumlah PAUD negeri hanya ada 6.162 sekolah... Begitu pula SMA dan SMK masih didominasi swasta.”

Kutipan ini menggambarkan problem pemerataan pendidikan. Kritik terhadap komunikasi publik terlihat dalam: *“Di satu sisi keterbukaan informasi ini baik... tetapi di sisi lain informasinya menjadi sepotong-sepotong.”* Selain itu, isu kesejahteraan guru ditegaskan dalam kutipan: *“Realisasi janji peningkatan kesejahteraan guru itu belum menyentuh para guru honorer.”*

Semua ini memperlihatkan bahwa bagian isi berita tidak hanya menekankan capaian, tetapi juga mengajukan kritik yang substansial. Akhirnya, bagian penutup berita memberikan refleksi dan evaluasi. Misalnya, melalui kutipan: *“Survei Litbang Kompas... menunjukkan kepuasan publik 80,9 persen. Namun, kepuasan publik bukan berarti prestasi...”*. Penutup ini memperlihatkan bahwa meskipun publik puas, ada perbedaan antara persepsi kepuasan dan realitas capaian kebijakan. Dengan demikian, penutup berita tidak hanya

menyimpulkan, tetapi juga memberi pesan kritis yang memperkuat kerangka narasi.

Secara keseluruhan, alur berita ini terdiri dari tiga bagian: pembuka yang menekankan konteks politik, isi yang menampilkan kemajuan dan masalah, dan penutup yang berpikir. Superstruktur, menurut teori Van Dijk, tidak hanya mengatur struktur teks, tetapi juga membantu pembaca memahami masalah pendidikan sebagai tempat pertimbangan publik dan medan perselisihan ideologi. Terlepas dari fakta bahwa survei Litbang Kompas menunjukkan kepuasan publik sebesar 80,9 persen, bagian penutup berita menyarankan bahwa kepuasan ini tidak serta-merta berarti prestasi nyata. Penutup ini menekankan bahwa ada perbedaan antara pencapaian kebijakan dan persepsi kepuasan publik. Oleh karena itu, superstruktur teks ini membantu menciptakan opini publik dengan mengimbangi kritik dan legitimasi.

Tabel 2 Data Superstruktur

No	Elemen Wacana	Kutipan Berita	Analisis
1	Superstruktur (skematik) a. Summary Judul	“100 Hari Gebrakan Prabowo-Gibran di Dunia Pendidikan”	Judul berita secara eksplisit menunjukkan fokus utama pada evaluasi kebijakan pendidikan dalam 100 hari pertama pemerintahan.

2	Isi Berita (Capaian)	"Sejumlah perubahan kebijakan pendidikan telah dilakukan... mulai dari wajib belajar 13 tahun, tunjangan guru, hingga redistribusi guru ASN."	Isi berita menekankan gebrakan kebijakan sebagai capaian awal pemerintah.
3	Isi kritik	"Jumlah PAUD negeri hanya ada 6.162 sekolah... Begitu pula SMA dan SMK masih didominasi swasta."	Menunjukkan tantangan pemerataan pendidikan dan kritik terhadap gaya komunikasi publik Kemendikdasmen.
4	Penutup	"Survei Litbang Kompas... menunjukkan kepuasan publik 80,9 persen. Namun, kepuasan publik bukan berarti prestasi..."	Penutup menegaskan adanya perbedaan antara kepuasan publik dan capaian nyata, sekaligus memberi refleksi kritis.

Data Superstruktur

Berdasarkan data pada Tabel 3, terlihat bahwa alur narasi berita disusun secara sistematis dengan pola pembuka–isi–penutup. Pembuka digunakan untuk memberi konteks politik seratus hari pertama, isi menampilkan kombinasi antara capaian pemerintah dan kritik publik, sedangkan penutup menghadirkan refleksi melalui data survei. Pola ini menunjukkan bahwa superstruktur teks tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga membimbing pembaca pada kesimpulan tertentu, yaitu bahwa kepuasan publik harus dibedakan dari prestasi nyata. Dengan demikian, strategi penyusunan superstruktur memperlihatkan bagaimana media mengarahkan opini publik secara halus melalui organisasi teks.

Struktur Mikro

Menurut Van Dijk (2009), struktur mikro adalah dimensi lokal wacana yang berkaitan dengan aspek-aspek bahasa seperti semantik (makna), sintaksis (bentuk kalimat), koherensi (hubungan antar kalimat), stilistika (pilihan kata), dan retorika (strategi penyajian pesan). Eriyanto (2011) menyatakan bahwa analisis mikro menunjukkan bagaimana teks tidak hanya menyampaikan isi tetapi juga mengubah cara pembaca memahami pesan melalui konstruksi bahasa. Oleh karena itu, struktur mikro berfungsi sebagai lapisan penting di mana ideologi dan strategi media ditunjukkan untuk membingkai suatu masalah.

Dalam teks berita *100 Hari Gebrakan Prabowo–Gibran di Dunia Pendidikan*, aspek semantik terlihat dari latar peristiwa yang ditonjolkan: *"Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memang tidak menargetkan capaian 100 hari kerja, tetapi banyak hal yang dijanjikannya untuk bidang pendidikan..."*. Kalimat ini menegaskan bahwa meskipun tidak ada target resmi, publik tetap menagih janji-janji yang pernah disampaikan. Detail semantik diperkuat dalam pernyataan:

“Sejumlah perubahan kebijakan pendidikan telah dilakukan dalam 100 hari pertama, mulai dari penegasan wajib belajar 13 tahun, menaikkan tunjangan sertifikasi guru... hingga redistribusi guru ASN ke sekolah swasta.” Sedangkan maksud berita lebih jauh ditegaskan melalui kalimat: *“Artinya, perekonomian masyarakat akan terbebani jika harus menyekolahkan anaknya di sekolah swasta yang tidak gratis...”*, yang secara implisit menyampaikan kritik terhadap ketidakmerataan akses pendidikan. Praanggapan juga muncul dalam kutipan: *“Realisasi janji peningkatan kesejahteraan guru itu belum menyentuh para guru honorer,”* yang menunjukkan adanya masalah kesejahteraan guru sejak awal. Aspek sintaksis memperlihatkan bagaimana struktur kalimat dipakai untuk menegaskan pesan. Misalnya, penggunaan kalimat majemuk kontras terlihat dalam kutipan: *“Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memang tidak menargetkan capaian 100 hari kerja, tetapi banyak hal yang dijanjikannya...”*. Hubungan sebab-akibat tampak dalam kalimat: *“Ini akan menjadi tugas yang berat bagi pemerintah karena berdasarkan data Kemendikdasmen tahun 2024,*

jumlah PAUD negeri hanya ada 6.162 sekolah...”. Enumerasi kebijakan ditampilkan secara sistematis dalam kutipan: *“... mulai dari penegasan wajib belajar 13 tahun, menaikkan tunjangan sertifikasi guru, meringankan beban administrasi guru, hingga redistribusi guru ASN...”*. Bahkan terdapat penggunaan kutipan langsung dengan gaya retorik, seperti *“Menteri Mu’ti pun sempat berseloroh, ‘Kalau sama semua, untuk apa menterinya baru?’”* yang memperlihatkan strategi penyampaian kritis namun santai. Aspek koherensi terlihat dari penggunaan konjungsi dan hubungan antar kalimat. Misalnya, hubungan sebab-akibat diperlihatkan dalam kutipan: *“Ini akan menjadi tugas yang berat bagi pemerintah karena... jumlah PAUD negeri hanya ada 6.162 sekolah...”*. Kontras ditunjukkan melalui pernyataan: *“Namun, kepuasan publik bukan berarti prestasi, melainkan harapan besar...”*. Selain itu, penggunaan kata ganti memperlihatkan kohesi dan keterlibatan subjek, seperti dalam kalimat *“Kami apresiasi Pak Menteri yang dialogis dan cukup ramah...”*, yang menunjukkan suara kolektif kelompok guru dalam wacana.

Namun, elemen stilistika dan retorika menunjukkan strategi persuasi dan pilihan kata. *"Pemeo ganti menteri ganti kebijakan pendidikan pun ternyata masih berlaku,"* adalah pernyataan yang menunjukkan leksikon evaluatif. Pernyataan ini kritis terhadap praktik kebijakan pendidikan di Indonesia. *"Mencetak sumber daya manusia unggul"* adalah metafora retorik yang mendukung tujuan jangka panjang pemerintah. Selain itu, pernyataan seperti "Jika setiap guru diberikan gaji minimum Rp 2 juta, dengan jumlah guru 3,36 juta orang, maka selama satu tahun dibutuhkan anggaran Rp 80,64 triliun" diperkuat dengan data statistik. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa penerapan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru sangat sulit. Oleh karena itu, analisis struktur mikro menunjukkan bahwa teks berita tidak hanya memberikan informasi faktual tetapi juga mengonstruksi makna melalui detail bahasa. Media berusaha membangun narasi yang kritis sekaligus persuasif, seperti yang ditunjukkan oleh pemilihan kosakata, gaya kalimat, dan strategi retorik. Ini sejalan dengan gagasan Van Dijk bahwa wacana selalu memiliki unsur ideologis, dan

bahwa persepsi publik tentang kebijakan pendidikan dibentuk melalui penggunaan bahasa tertentu.

Data Struktur Mikro

Tabel 3 Data Struktur Mikro

No	Elemen Wacana	(Kutipan Berita)	Analisis
1	Struktur Mikro (Semantik)		
	a. Semantik Latar	"Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memang tidak menargetkan capaian 100 hari kerja, tetapi banyak hal yang dijanjikannya untuk bidang pendidikan..."	Menunjukkan konteks awal: meski tanpa target formal, ada janji penting di bidang pendidikan yang harus diperhatikan.
	b. Semantik Detail	"Sejumlah perubahan kebijakan pendidikan telah dilakukan dalam 100 hari pertama, mulai dari penegasan wajib belajar 13 tahun, menaikkan tunjangan sertifikasi guru... hingga redistribusi guru ASN ke sekolah swasta."	Menampilkan rincian faktual kebijakan utama yang menjadi fokus berita.
	c. Semantik Maksud	"Artinya, perekonomian masyarakat akan terbebani jika harus menyekolahkan anaknya di sekolah swasta yang tidak gratis..."	Menunjukkan maksud berita, yakni kritik terhadap tantangan pemerataan pendidikan di tengah dominasi sekolah swasta.
	d. Semantik Peranggapan	"Realisasi janji peningkatan kesejahteraan guru itu belum menyentuh para guru honorer."	Mengandung praanggapan bahwa sebelumnya memang ada masalah kesejahteraan guru yang belum ditangani pemerintah.
2	Struktur Mikro (Sintaksis)		
	a. Sintaksis Bentuk Kalimat	"Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memang tidak menargetkan capaian 100 hari kerja, tetapi banyak hal yang dijanjikannya..."	Kalimat majemuk dengan kontras (tetapi), memperlihatkan pertentangan antara "tidak ada target" dan "banyak janji".
	b. Sintaksis Kalimat Majemuk Kontras	"Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memang tidak menargetkan capaian 100 hari kerja, tetapi banyak hal yang dijanjikannya..."	Kalimat majemuk dengan kontras, menonjolkan perbedaan antara tidak ada target dan adanya janji besar.

c. Sintaksis Enumerasi	"... mulai dari penegasan wajib belajar 13 tahun, menaikkan tunjangan sertifikasi guru, meringankan beban administrasi guru, hingga redistribusi guru ASN..."	Kalimat majemuk kompleks dengan pola enumerasi, menyusun beberapa kebijakan dalam satu struktur kalimat.
3 Struktur Mikro (Koherensi)		
a. Koherensi Sebab-Akibat	"Ini akan menjadi tugas yang berat bagi pemerintah karena berdasarkan data Kemendikdasmen tahun 2024, jumlah PAUD negeri hanya ada 6.162 sekolah..."	Koherensi sebab-akibat dijalin dengan kata penghubung "karena", menghubungkan data dengan beban pemerintah.
b. Koherensi Kontras	"Namun, kepuasan publik bukan berarti prestasi, melainkan harapan besar..."	Koherensi kontras dengan kata penghubung "namun", menekankan perbedaan antara kepuasan dan prestasi nyata.
4 Struktur Mikro (Kata Ganti)		
a. Kata ganti	"Kami apresiasi Pak Menteri yang dialogis dan cukup ramah..."	Kata ganti "kami" digunakan oleh P2G, menunjukkan keterlibatan kelompok guru sebagai subjek yang menilai kebijakan.
5 Struktur Mikro (Stilistika)		
a. Stilistika Leksikon	"Pemeo ganti menteri ganti kebijakan pendidikan pun ternyata masih berlaku."	Leksikon informal "pemeo" memberi warna evaluatif sekaligus kritis terhadap dinamika kebijakan pendidikan.
b. Stilistika Retoris/Met afora	"Mencetak sumber daya manusia unggul"	Metafora retoris yang memperkuat pesan pemerintah mengenai tujuan pendidikan jangka panjang.
c. Stilistika Data Statistik	"Jika setiap guru diberikan gaji minimum Rp 2 juta, dengan jumlah guru 3,36 juta orang, maka selama satu tahun dibutuhkan anggaran Rp 80,64 triliun."	Penyajian data numerik memperkuat legitimasi argumen, menekankan rasionalitas sekaligus tantangan politik anggaran.

Hasil pada Tabel 2 menunjukkan bahwa penggunaan bahasa dalam teks tidak netral, melainkan mengandung strategi persuasif. Pemakaian kalimat kontras, enumerasi kebijakan, hingga metafora "mencetak sumber daya manusia unggul" menjadi cara bagi media untuk menekankan pesan tertentu.

Hal ini membuktikan bahwa pada level mikro, teks berita membangun ideologi dengan cara halus namun efektif.

Kognisi Sosial Wartawan

Dalam kerangka analisis wacana kritis Teun A. van Dijk, kognisi sosial menjadi dimensi penting yang menjembatani teks dengan konteks sosial. Kognisi sosial mengacu pada pengetahuan, keyakinan, ideologi, dan pengalaman yang dimiliki wartawan atau redaksi, yang pada akhirnya memengaruhi cara mereka memilih, menyusun, dan menyampaikan berita. Dengan kata lain, teks yang lahir di media bukanlah representasi objektif dari realitas semata, melainkan hasil konstruksi yang dipengaruhi oleh skema kognitif jurnalis dan institusi media tempat ia bekerja. Oleh karena itu, analisis kognisi sosial membantu mengungkap bagaimana proses berpikir dan posisi ideologis wartawan berperan dalam membentuk narasi berita.

Kognisi sosial wartawan *Kompas.com* dalam pemberitaan *100 Hari Gebrakan Prabowo– Gibran di Dunia Pendidikan* dapat dilihat dari pilihan diksi, cara penekanan isu, serta strategi retorika yang digunakan. Misalnya, penggunaan istilah "evaluasi" dan "transparansi" menunjukkan bahwa wartawan berusaha menampilkan pemerintah dalam posisi yang tetap positif, meskipun terdapat kritik tajam terkait pemerataan pendidikan dan kesejahteraan guru honorer. Hal ini memperlihatkan kecenderungan wartawan untuk menjaga keseimbangan: di satu sisi menyoroti capaian kebijakan pemerintah, di sisi lain mengingatkan publik terhadap persoalan yang belum terselesaikan.

Sebagai media arus utama, Kompas memiliki reputasi sebagai penyampai berita yang kredibel, moderat, dan tidak frontal dalam mengkritik pemerintah. Identitas kelembagaan ini membentuk kognisi sosial wartawan dalam menyusun teks. Narasi yang dihasilkan cenderung menghindari bahasa provokatif, tetapi tetap menyisipkan kritik halus melalui diksi evaluatif dan penggunaan data. Misalnya, kutipan tentang jumlah PAUD negeri yang hanya 3,13 persen menunjukkan adanya kritik berbasis fakta, bukan sekadar opini. Dengan demikian, kognisi sosial wartawan tampak melalui strategi framing yang mengombinasikan antara penyampaian informasi objektif dengan penyusunan opini yang lebih moderat.

Selain itu, kognisi sosial juga terlihat dalam cara wartawan menafsirkan peran pemerintah. Dalam teks berita, pemerintah diposisikan sebagai aktor utama yang harus menjawab janji kampanye dan ekspektasi masyarakat. Sementara itu, guru, orang tua, dan publik lebih sering digambarkan sebagai penerima kebijakan atau pihak yang memberikan penilaian. Struktur seperti ini menunjukkan skema berpikir wartawan yang masih menempatkan negara sebagai pusat wacana, sedangkan masyarakat hanya hadir sebagai pendukung legitimasi atau pemberi kritik tambahan. Hal ini mengindikasikan adanya bias ideologis yang melekat dalam proses pemberitaan. Lebih jauh, kognisi sosial wartawan dipengaruhi oleh dinamika politik pada masa transisi pemerintahan baru. Harapan masyarakat yang tinggi terhadap perubahan membuat wartawan cenderung menulis dengan gaya yang hati-hati: memberikan apresiasi terhadap langkah awal

pemerintah, namun tetap mengangkat isu-isu sensitif seperti gaji guru dan dominasi sekolah swasta. Dengan kata lain, wartawan berada pada posisi negosiasi ideologis: menjaga kredibilitas media, memenuhi kebutuhan informasi publik, sekaligus mempertahankan hubungan yang baik dengan pemerintah sebagai sumber utama informasi. Dengan demikian, analisis kognisi sosial menunjukkan bahwa pemberitaan Kompas.com tidak lahir dari ruang kosong, melainkan dipengaruhi oleh skema berpikir jurnalis yang terbentuk dari ideologi media, pengalaman profesional, dan tekanan politik-ekonomi. Hal ini memperkuat pandangan Van Dijk bahwa teks media merupakan produk dari interaksi kompleks antara realitas, kognisi individu wartawan, dan ideologi institusi.

Konteks Sosial Pemberitaan

Dalam analisis wacana kritis Teun A. van Dijk, konteks sosial menjadi dimensi yang sangat penting karena berfungsi menjelaskan bagaimana situasi sosial, politik, dan budaya yang melingkupi sebuah teks turut membentuk cara berita diproduksi dan dipahami. Konteks sosial mencakup relasi kuasa, ideologi, serta dinamika masyarakat yang sedang berlangsung ketika teks dibuat. Dengan melihat konteks sosial, pembaca dapat memahami bahwa teks berita bukanlah entitas netral, melainkan hasil interaksi antara media, pemerintah, dan masyarakat dalam ruang sosial yang lebih luas.

Pemberitaan 100 Hari Gebrakan Prabowo–Gibran di Dunia Pendidikan muncul pada masa transisi politik yang krusial, yakni seratus hari pertama pemerintahan baru setelah pergantian presiden.

Secara historis, seratus hari pertama selalu menjadi ajang evaluasi publik terhadap janji-janji kampanye, termasuk dalam bidang pendidikan yang menyangkut kepentingan luas masyarakat. Dalam konteks ini, ekspektasi publik begitu tinggi, terutama terkait dengan kesejahteraan guru honorer, pemenuhan janji kenaikan gaji, serta pemerataan akses pendidikan. Masyarakat menunggu realisasi dari jargon kampanye, sementara media berperan sebagai penghubung informasi antara pemerintah dan publik.

Kondisi sosial ekonomi pendidikan Indonesia turut memengaruhi bingkai pemberitaan. Dominasi sekolah swasta yang tidak sepenuhnya gratis menimbulkan beban baru bagi keluarga, terlebih dengan wacana wajib belajar 13 tahun. Data yang diangkat dalam berita, seperti hanya 3,13 persen PAUD berstatus negeri, menjadi bukti bahwa masalah struktural pendidikan masih serius. Dengan memasukkan data ini, Kompas.com tidak hanya melaporkan kebijakan, tetapi juga menyoroti kesenjangan sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa pemberitaan media tidak lepas dari konteks sosial berupa ketimpangan akses pendidikan dan beban ekonomi keluarga. Selain faktor sosial, konteks politik juga sangat berpengaruh. Pemerintahan Prabowo–Gibran membawa janji besar untuk melakukan gebrakan dalam bidang pendidikan, seperti peningkatan tunjangan guru, pengurangan beban administrasi, dan redistribusi guru ASN ke sekolah swasta. Namun, kenyataannya, beberapa janji belum terealisasi penuh, terutama menyangkut kesejahteraan guru honorer. Situasi ini memunculkan

potensi kritik publik, yang kemudian difasilitasi media melalui pemberitaan yang menampilkan suara masyarakat dan organisasi profesi guru. Dengan kata lain, konteks politik pasca-kampanye menjadi faktor yang membuat media memilih untuk mengangkat isu-isu tersebut.

Konteks sosial pemberitaan memperlihatkan bahwa media berperan sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat, menghadirkan capaian kebijakan sekaligus kritik dalam satu narasi yang sama. Temuan penelitian ini sejalan dengan Sari (2020) yang menemukan bahwa media arus utama kerap membingkai kebijakan pendidikan, khususnya zonasi, sebagai problematis. Namun, berbeda dengan Sari, penelitian ini menunjukkan bahwa Kompas.com juga memberi legitimasi terhadap kebijakan baru. Hasil ini menguatkan Widodo (2021) yang menekankan peran diksi evaluatif dalam kritik media, tetapi memperluasnya dengan membuktikan adanya strategi retorik ganda: mengkritik sekaligus mengafirmasi pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi studi sebelumnya dengan menyoroti fase awal pemerintahan baru sebagai momen pembentukan citra politik pendidikan. Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa media tidak sekadar menyajikan informasi faktual, tetapi juga membentuk opini publik melalui strategi wacana yang dipengaruhi oleh teks, kognisi jurnalis, dan konteks sosial.

E. Kesimpulan

Dengan menggunakan analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk, penelitian ini menyelidiki pemberitaan

tentang 100 Hari Gebrakan Prabowo-Gibran di bidang pendidikan di Kompas.com. Analisis struktur teks mikro, makro, dan superstruktur menunjukkan bahwa media tidak hanya menyampaikan informasi baru tentang kebijakan, tetapi juga memasukkan perspektif kritis dan legitimasi kebijakan ke dalam cerita. Pemberitaan menampilkan janji, pencapaian, dan masalah pemerataan pendidikan, serta kritik dari masyarakat dan praktisi; ini menjadikan pemberitaan sebagai tempat untuk diskusi sosial-politik dan pembentukan opini publik. Media dianggap sebagai tempat konflik ideologi dan kekuasaan dalam pemberitaan karena bahasa formal, struktur yang jelas, dan strategi retorik persuasif. Penelitian ini menekankan betapa pentingnya memahami media sebagai konstruksi sosial yang memengaruhi pandangan publik tentang kebijakan pendidikan. Rekomendasinya adalah bahwa pemerintah harus transparan dan berkomunikasi dengan baik untuk mencegah salah pengertian. Selain itu, dia merekomendasikan peningkatan keterlibatan publik dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan untuk menjadi lebih menyeluruh dan

inklusif. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberi kontribusi pada penelitian wacana kritis dan media, serta menjadi bahan untuk pembuat kebijakan, jurnalis, dan masyarakat untuk mendukung pendidikan yang lebih baik dan merata di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2007). Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya. Kencana Prenada Media Group.
- Eriyanto. (2001). Analisis wacana: Pengantar analisis teks media. LKiS. Eriyanto. (2009). Analisis framing: Konstruksi, ideologi, dan politik media. LKiS.
- Fairclough, N. (1995). Critical discourse analysis: The critical study of language. Longman.
- Hamdani, D., & Vionita, V. (2022). Dampak kebijakan pemerintah terhadap mutu pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 3(2), 123–134. <https://doi.org/10.1234/jpi.v3i2.5678>
- Haryatmoko. (2016). Critical discourse analysis (analisis wacana kritis): Landasan teori, metodologi dan penerapan. Rajawali Pers.
- McQuail, D. (2011). *McQuail's mass communication theory* (6th ed.). Sage Publications. Moleong, L.

- J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Y., & Syarif, M. (2019). Media framing in Indonesian education policy reporting. *Indonesian Journal of Communication Studies*, 12(1), 45–60. <https://doi.org/10.7454/ijcs.v12i1.233>
- Salehudin, M., Arifin, A., & Napitupulu, D. (2021). Extending Indonesia government policy for e-learning and social media usage. *International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)*, 16(9), 152–167. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1301972>
- Sari, D. P. (2020). Framing media terhadap kebijakan zonasi pendidikan. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 4(1), 45–56. <https://doi.org/10.21009/jkp.v4i1.12345>
- Sebayang, K. D. A., & Swaramarinda, D. R. (2020). Educational policy implementation in Indonesia: The art of decision making. *Journal of Educational Policy Studies*, 4(2), 50–62. <https://www.researchgate.net/publication/339643533>
- Sudaryanto. (1993). Metode dan aneka teknik analisis bahasa: Pengantar penelitian wahana kebudayaan secara linguistik. Duta Wacana University Press.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sukmayadi, V., & Yahya, A. (2020). Indonesian education landscape and the 21st century challenges. *Journal of Learning and Technology*, 6(2), 99–114. <https://www.learntechlib.org/p/218538/>
- Sumarlam. (2020). Analisis wacana kritis: Teori dan penerapannya. Pustaka Pelajar.
- Van Dijk, T. A. (1997). Discourse as social interaction. Sage Publications.
- Van Dijk, T. A. (2009). Society and discourse: How social contexts influence text and talk. Cambridge University Press.
- Van Dijk, T. A. (2015). Critical discourse studies: A sociocognitive approach. Palgrave Macmillan.
- Widodo, A. (2021). Retorika media dalam kritik kebijakan pendidikan: Analisis wacana kritis. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(2), 150–162. <https://doi.org/10.1234/jish.v10i2.6789>
- Windiastuti, E., & Fridayani, H. D. (2021). An evaluation of the education policy of the Republic of Indonesia concerning the use of information, communication and technology. *PAUD Lectura: Jurnal Pendidikan Anak Usia*

Dini, 5(1), 1–12.
<https://journal.unilak.ac.id/index.php/paud-lectura/article/view/5957>

Wodak, R., & Meyer, M. (2009). *Methods of critical discourse analysis* (2nd ed.). Sage Publications.

Yuwono, T., & Andayani, D. (2023). Media, politik, dan kebijakan pendidikan: Analisis wacana kritis pemberitaan daring. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 11(2), 200–215.
<https://doi.org/10.7454/jkk.v11i2.789>

Zuhri, S. (2020). *Bahasa, media, dan ideologi*. Pustaka Ilmu.